I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja organisasi pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah (organisasi publik). Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah (organisasi publik) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif. Kinerja kerap diartikan secara sempit, yaitu sebagai prestasi kerja. Pencapaian kinerja suatu organisasi biasanya dilaksanakan dengan menggunakan manajeman pemerintahan yang baik.

Manajemen pemerintahan adalah faktor utama dalam suatu instansi pemerintah, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian manajemen pemerintahan tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakatnya.

Tugas pemerintahan yang paling dominan adalah menyediakan barang-barang publik (*public utility*) dan memberikan pelayanan (*public service*) misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan sebagainya. Dalam penyediaan barang-barang tersebutlah masyarakat dapat melihat kinerja pemerintah secara langsung, karena barang-barang dan pelayanan tersebut dapat secara langsung diraskan oleh masyarakat.

Manajemen merupakan gerak jiwa dari administrasi, organisasi sebagai anatomi dari adiministrasi, sedangkan manajemen sebagi psikologisnya. Di dalam organisasilah berlangsung kegiatan-kegiatan manajemen, kerena manajemen juga dibutuhkan untuk semua tipe kegiatan yang diorganisasikan dalam semua tipe organisasi, temasuk didalamnya adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Tanggamus sebagai organisasi publik. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola. Dalam organisasi publik dalam hal ini Dinas TPH biasanya disebut kepala dinas.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Tanggamus yang dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus. Sebagai SKPD Dinas TPH merupakan sebagai ujung tombak Pembangunan Pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Tanggamus.

Pembangunan Pertanian khususnya tanaman pangan di Kabupaten Tanggamus membutuhkan kerja keras dari semua elemen pertanian baik Pemerintah Daerah ataupun *stakeholdres* dengan ujung tombaknya Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura. Dalam mengelola masyarakat pertanian yang besar tersebut Dinas TPH menerapkan sistem manajemen pemerintahan yang mengatur jajarannya ataupun *stakeholders* yang terlibat didalamnya. Dalam menjalankan administrasi pemerintahan Kepala Dinas selaku pimpinan tertinggi pada Dinas TPH menerapkan manajemen pemerintahan yang akan dijabarkan oleh bawahannya secara baik dimulai dengan perencanaan yang matang.

Manajer (pimpinan organisasi) dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang terkenal dengan kata-kata ”P-O-A-C” yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (menggerakkan), dan *Controlling* (pengawasan).

Kinerja Dinas TPH Kabupaten Tanggamus dijabarkan dalam bentuk program pembangunan. Program-program yang telah ditetapkan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Dinas TPH Kabupaten Tanggamus yang nantinya dianggarkan baik melalui dana Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus, dan APBD. Perlunya pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan Dinas TPH Kabupaten Tanggamus sehingga dalam pelaksanaannya harus ditangani oleh para pegawai yang mempunyai kemampuan dibidangnya.

Tahun Anggaran 2009 Kinerja Dinas TPH Kabupaten Tanggamus dapat dilihat dari jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja, baik Belanja Langsung ataupun tidak langsungnya. Jumlah target, realisasi, pencapai target PAD dan Belanja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Berikut

Tabel 1. Jumlah Target, Realisasi, Pencapai Target PAD dan Belanja Dinas TPH Kabupaten Tanggamus TA. 2009.

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	50.000.000	38.350.000	76,70
2.	Belanja Tidak langsung	2.369.585.433	2.414.612.018	101,90
3.	Belanja langsung	2.301.505.150	2.197.755.742	95,49
4.	Dana Tugas Pembantuan	4.725.450.000	4.696.075.000	99,38

Sumber : Laporan Tahunan Dinas TPH Kabupaten Tanggamus Tahun 2009.

Tabel 1. di atas dapat dilihat bahwa kinerja pendapatan asli daerah yang yang dibebankan pada Dinas TPH Kabupaten Tanggamus hanya terealisasikan sebesar 76,70% dari target sebesar Rp.50.000.000,- hanya tercapai Rp.38.350.000,-. Belanja tidak langsung terjadi kelebihan realisasi sebesar 101,90% dari target Rp. 2.369.585.433,- terealisasikan sebesar Rp. 2.414.612.018,-. Belanja langsung terealisasikan sebesar 95,49% dari target Rp. 2.301.505.150,- terealisasikan sebesar Rp. 2.197.755.742,-. Dana tugas pembantuan terealisasikan sebesar sebesar 99,38% dari target Rp. 4.725.450.000,- terealisasikan sebesar Rp. 4.696.075.000,-.

Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja suatu organisasi adalah dalam hal keuangannya. Keuangan organisasi terdapat dua hal pokok yang dapat diperhatikan, yaitu pendapatan organisasi dan besarnya belanja organisasi tersebut. Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus kedua hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. di atas.

Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus terlihat rendah pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinas yang hanya terealisasi sebesar 76,70%. Pencapaian target ini lebih rendah dari pencapaian target pada belanja yang ada. Rendahnya pencapaian PAD dinas ini dapat mencverminkan rendahnya kinerja organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam hal pemasukan pada kas daerah.

Tahun 2009 terjadi masalah dalam hal PAD pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggaus, namun hal berbeda terjadi pada belanja baik yang sifatnya belanja tdak langsung ataupun belanja langsung (kegiatan). Pencapaian target pada belanja baik yang di danai oleh dana APBD ataupun APBN penyerapannya cukup tinggi dimana terjadi penyerapan di atan 95 %.

Hal lain yang dapt dijadikan tolok ukur dalam pencapaian kinerja dinas adalah prestasi yang dicapai yang salah satunya adalah peningkatan produksi padi yang dicapai oleh Kabupaten Tanggamus dimana pada Tahun 2008 produksi pada sebesar 211.365 ton meningkat menjadi 237.182 ton pada Tahun 2009. Peningkatan produksi ini mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu penghargaan yang diberikan oleh Presiden RI kepada Bupati Tanggamus sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang peningkatan produksinya di atas 5%.

Pencapaian target dalam kinerja dinas dimulai dari fungsi pertama dari fungsi manajemen yaitu perencanaan. Perencanaan pada umumnya menentukan kegiatan apa yang dilakukan, kapan dilakukan, berapa anggaran yang tersedia dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Rencana pada hakekatnya menjembatani

apa yang ada pada saat sekarang dengan apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Dalam perencanaan faktor yang terpenting adalah ketepatan dalam menentukan sasaran karena akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan.

Pencapaian tujuan Dinas TPH Kabupaten Tanggamus tidak terlepas dari fungsi manajemen yang lainnya seperti pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah Kepala Dinas dalam melakukan fungsi pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

Dalam menjalankan roda organisasi Dinas TPH maka diperlukan pegawai pemerintahan yang handal dan professional. Pegawai yang mempunyai jiwa pengabdian dan kesadaran akan tugas yang tinggi, berpendidikan, disiplin, mempunyai motivasi yang tinggi, memiliki jaringan yang luas, bertanggungjawab, dan mempunyai keterampilan dalam teknologi. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai yang mempunyai kemampuan yang tinggi. Seseorang pegawai tanpa memiliki kemampuan yang tinggi akan menurunkan citra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus. Oleh sebab itu, maka kebutuhan akan tersedianya pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mampu adalah

kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Sebab dari uraian tersebut di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa tingkat kemampuan pegawai akan mempengaruhi keberhasilan Dinas TPH Kabupaten Tanggamus. Dengan kata lain tinggi rendahnya tingkat kemampuan pegawai akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pencapaian kinerja Dinas.

Kemampuan pegawai akan sangat mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dari Dinas TPH Kabupaten Tanggamus sehingga diperlukan orang-orang yang berkualitas yang duduk pada unti-unit yang ada sehingga dapat menggerakkan jalannya organisasi. Untuk mendukung kegiatan dinas tersebut maka dibutuhkan kerja sama antar bidang yang ada sehingga satu bidang dengan bidang yang lainnya terjadi keselarasan dalam bekerja.

Selain dibutuhkannya pegawai yang berkemampuan baik dalam dalam adminstrasi untuk mendukung kinerja dinas, maka dibutuhkan pula pegawai-pegawai yang mempunyai kemampuan teknis bidang pertanian seperti pegawai-pegawai fungsional seperti pengendali hama penyakit, pengawas mutu benih, dan petugas pemantau harga pasar. Kebutuhan pegawai yang mempunyai kemampuan spesialis ini harus dapat diwujudkan sehingga kemapuan pegawai pada Dinas TPH akan semakin lengkap.

Organisasi Dinas TPH Kabupaten Tanggamus mempunyai tujuan memajukan sektor pertanian di Kabupaten Tanggamus terutama tanaman pangan dan hortikultura sehingga dapat mensejahterakan insan pertanian dalam hal ini yang utama adalah petani. Dalam Dinas TPH diperlukan administrasi perkantoran yang didukung insfrastruktur seperti ruang kerja, peralatan kantor modern yang dapat

dioperasikan oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, serta kendaraan dinas yang dapat mendukung terciptanya perencanaan pada dinas sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Sarana dan prasaran kerja yang baik biasanya akan berdampak pada hasil kerja yang dicapai sehingga menghasilkan pekerjaan yang baik pula.

Dinas TPH Kabupaten Tanggamus telah menggunakan infrastruktur berupa ruang kerja, peralatan-peralatan kantor yang cukup modern didalam menjalankan administrasi perkantorannya, kendaraan dinas dalam mendukung mobilisasi pegawai dalam melaksanakan perencanaan. Penggunaan sarana prasarana tersebut tidak semuanya dapat dipenuhi dinas (kendaraan dinas) dan tidak semuanya pegawai dapat menguasai penggunaan peralatan kantor, sehingga diperlukan apartur yang berkualitas sehingga tidak menghambat administrasi dan roda organisasi.

Penggunaan peralatan kantor yang bukan untuk menyelesaikan tugas kedinasan masih sering dilakukan oleh pegawai lingkup Dinas TPH harus dapat diminimalisir. Begitu pula halnya dengan penggunaan kendaraan dinas yang bukan untuk perkerjaan dinas dan diluar jam dinas masih sering dilakuan. Untuk itu diperlukan komitmen oleh para pegawai agar dapat menempatkan sesuatunya pada tempat dan peruntukannya.

Pada dinas TPH sudah terbentuk standar kerja yang selama ini digunakan untuk menggerakkan roda organisasi dinas TPH kabupaten Tanggamus. Standar yang digunakan seperti alur kerja, struktur, pedoman teknis, kerja sama, dan suvervisi. Sistem yang ada ini dikendalikan oleh Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi

juga tidak terlepas dari sistem yang ada di Kabupaten yang merupakan organisasi yang lebih tinggi. Pelaksanaan standar ini juga tidak sepenuhnya dilakukan seperti pedomannya karena disana ada diskresi kepala dinas yang digunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan demi jalannya organisasi.

Struktur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Lembaga Pemerintah Daerah dimana Dinas TPH Kabupaten Tanggamus menggunakan pola minimal. Beban kerja yang besar ada pada Dinas TPH Kabupaten Tanggamus sehingga dengan menggunakan pola minimal dalam struktur organisasinya diperlukan kerja keras dari semua elemen untuk pencapaian kinerja yang baik .

Kemampuan administrasi yang terdiri atas infrstruktur dan standarisasi mempunyai kaitan yang erat dengan pencapaian kinerja Dinas TPH Kabupaten Tanggamus. Yang perlu mendapatkan perhatian di sini adalah betapapun baiknya infrastruktur dan standarisasi yang tersedia dan lingkungan yang mendukung, namun apabila manusia atau pegawainya tidak mampu, maka pekerjaan mustahil akan terselesaikan. Dengan demikian faktor kemampuan pegawai adalah faktor yang harus diperhitungkan juga dalam rangka pembahasan masalah Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.

Dalam rancangan strategis dan kebijakan pembangunan diperlukan adanya paradigma administrasi publik secara tepat, sehingga mampu memperhitungkan masalah dan tantangan sosial, ekonomi serta kelembagaan dari lingkungan secara

tepat dan serasi. Pembangunan harus dapat diimplementasikan dalam tindakan nyata agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Dalam implementasinya ternyata apa yang telah direncanakan dan digariskan oleh Dinas TPH tersebut di atas selalu saja ada kendalanya baik berupa kendala minimnya anggaran sehingga memerlukan skala prioritas dalam pelaksanaannya. Selain itu kesadaran dan disipiln pegawai masih perlu dilakukan pembinaan agar dapat menjadi pegawai yang profesionaldan dapat bekerja dengan baik.

Begitu pentingnya pencapaian kinerja Dinas TPH untuk mensejahterakan insan pertanian maka hal tersebut sebagai prioritas yang perlu diperhatikan. Kinerja yang baik perlu didukung dengan infrastruktur (sarana dan prasarana), standarisasi, dan kemapuan pegawai dalam menjalankannya. Infrastruktur, standarisasi, dan kemampuan pegawai akan sangat menentukan Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan latar belakang uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Infrastruktur, Standarisasi, dan Kemampuan Pegawai Terhadap Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

(1) Berpengaruhkah Infrastruktur terhadap Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.

(2) Berpengaruhkah Standarisasi terhadap Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.

(3) Berpengaruhkah Kemampuan Pegawai terhadap Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.

(4) Berpengaruhkah Infrastruktur, Standarisasi, dan Kemampuan Pegawai terhadap Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

(1) Untuk mengetahui pengaruh Infrastruktur terhadap Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.

(2) Untuk mengetahui pengaruh Standarisasi terhadap Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.

(3) Untuk mengetahui pengaruh Kemampuan Pegawai terhadap Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.

(4) Untuk mengetahui pengaruh Infrastruktur, Standarisasi, dan Kemampuan Pegawai terhadap Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

(1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi pememikiran bagi studi Ilmu Pemerintahan terutama yang berkaitan dengan

manajemen pemerintahan, sehingga dalam perencanaan dalam suatu organisasi diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu perencanaan.

(2) Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengambil keputusan yaitu Kepala Dinas dalam merumuskan kewenangan dan kebijakan dalam hal manajemen perencanaan di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerahnya.